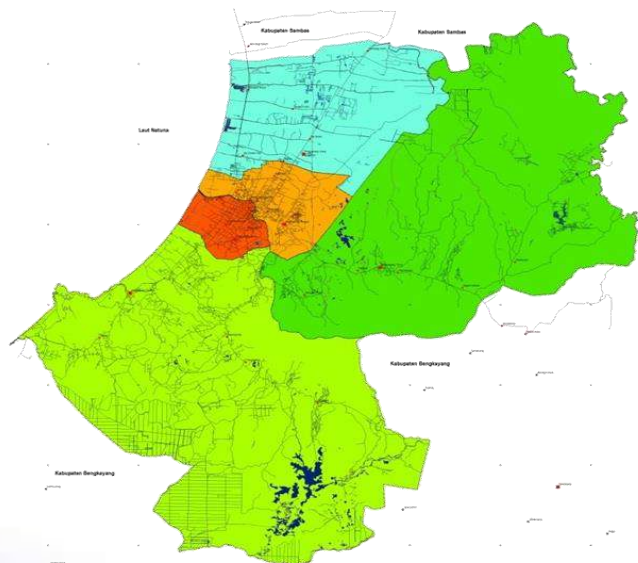




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG**

TAHUN 2018 - 2022



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123
Telp : (0562) 639472 Faks : (0562) 639472**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Strategis ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 serta dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, yang merupakan pedoman bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari Renstra yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang, namun demikian kami berharap Renstra ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Akhirnya kami berharap melalui Renstra ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang 2018-2022 yaitu "*Singkawang HEBAT 2022*".

Singkawang, Juli 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Singkawang



Drs. ARMAN SUYONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581108 198303 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	32
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
	5.1. Strategi.....	53
	5.2. Arah Kebijakan	54
BAB VI	RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
BAB VIII	PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	16
Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana Milik DISSOSPPPA Kota Singkawang Berdasarkan Jenis dan Jumlah Barang Extra Countable.....	17
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Milik DISSOSPPPA Kota Singkawang Berdasarkan Jenis dan Jumlah Barang Intra Countable	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	19
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ..	21
Tabel 2.7	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2013-2018	22
Tabel 2.8	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2013-2018	23
Tabel 2.9	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2013-2018.....	24
Tabel 2.10	Analisis Strategi dengan Faktor SWOT.....	28
Tabel 4.1	Keterkaitan Antara Visi, Misi dengan Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	52
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	54

Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.....	55
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022	63
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang	93
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Sosial Tahun 2018-2022	94
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022	95
Tabel 7.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	15
-------------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan mernaknai ketentuan diatas, maka pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara, serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerinrah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sisternatis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun daerah; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu rencana pembangunan 5 (lima) tahunan; dan (3) Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD), yaitu rencana pembangunan tahunan.

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan ketetapan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedornan pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

Pernerintah Kota Singkawang pada tanggal 19 Februari 2017 telah rnelaksanakan Pemilukada. Dalam Pemilukada dimaksud telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis TJHAI CHUI MIE, SE sebagai Walikota Singkawang dan Drs. H. IRWAN, M.Si sebagai Wakil Walikota Singkawang untuk periode masa jabatan Tahun 2017-2022 yang telah dilantik pada tanggal 17 Desember 2017 oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai wakil Pernerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

Selanjutnya, agar target pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka dalam penyusunan Rancangan Awal dokumen RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa jabatan Tahun 2017-2022, selain harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu juga memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah. Hal ini penting sebagai upaya agar antar pembangunan 5 (lirna) tahunan yang dilaksanakan oleh Pernerintah Kota Singkawang ada kesinambungan.

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang memuat visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih memiliki nilai strategis, karena akan berfungsi sebagai (a) pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun; (b) pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD); (c) sebagai instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda; (d) sebagai instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah; dan (e) pedoman evaluasi penyelenggaraan pernerintahan daerah. Hal ini telah

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, tanpa adanya dokumen RPJMD yang berkualitas, maka perumusan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai kendala, antara lain (a) penyelenggaraan rencana pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan secara kesinambungan; (b) pemerataan pembangunan untuk mewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat korelasi yang kuat antara pembangunan dalam dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah; (c) target sasaran, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam dokumen RPJMD tidak dijabarkan ke dalam dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan (d) hasil kinerja setiap Perangkat Daerah sulit untuk diukur.

Sedangkan pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), adalah dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunan perangkat daerah dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan perangkat daerah secara konsisten, selaras dan bersinergi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah.

Sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 dan pasal 273 serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Singkawang, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan dipertegas dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Sesuai kewenangannya maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Agar pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan maka perlu adanya perencanaan strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan tercapainya visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2022, dengan memperhatikan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022
23. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2018-2022;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Masa Akhir Jabatan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2022, yang disertai dengan program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang 2018-2022, dengan berpedoman pada RPMPD Kota Singkawang Tahun 2018-2025;
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2018-2022;
3. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018-2022;
4. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2018-2022;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2018-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan****Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan****Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan****Bab VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas;
- 4) penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Sub Bagian Aset

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji,

verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis rehabilitasi sosial;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial; melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, kelompok minoritas, tuna susila, pelayanan sosial lanjut usia; melaksanakan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA; dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial di bawah pembinaan Seksi Rehabilitasi Sosial.

2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial; melaksanakan penanggulangan kebencanaan, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana kebencanaan; melaksanakan pemberdayaan sumber daya relawan dan lembaga kebencanaan, serta aktivitas kearifan lokal dalam penanggulangan kebencanaan; melaksanakan peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial penduduk rentan; melaksanakan pengembangan kelembagaan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat; melaksanakan pelayanan sosial terhadap korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial; dan melaksanakan perizinan pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah dalam wilayah Kota Singkawang.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penanganan kemiskinan;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan sosial;
- 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

1) Seksi Penanganan Kemiskinan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanganan Kemiskinan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penanganan kemiskinan; melaksanakan identifikasi masalah kemiskinan; melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya individu, keluarga, kelompok perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas miskin (termasuk janda dan duda); melaksanakan peningkatan sumberdaya pendampingan program kemiskinan; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan; melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi terpadu terkait kemiskinan; dan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

2) Seksi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemberdayaan sosial; melaksanakan pemberdayaan Pekerja Sosial Profesional dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti Orsos dan yayasan bidang sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan potensi dunia usaha; melaksanakan pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial; dan melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; melaksanakan pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat; dan melaksanakan pendayagunaan data dan profil kelurahan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan perempuan;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan anak;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan; melaksanakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah; melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan; dan melaksanakan peningkatan kualitas

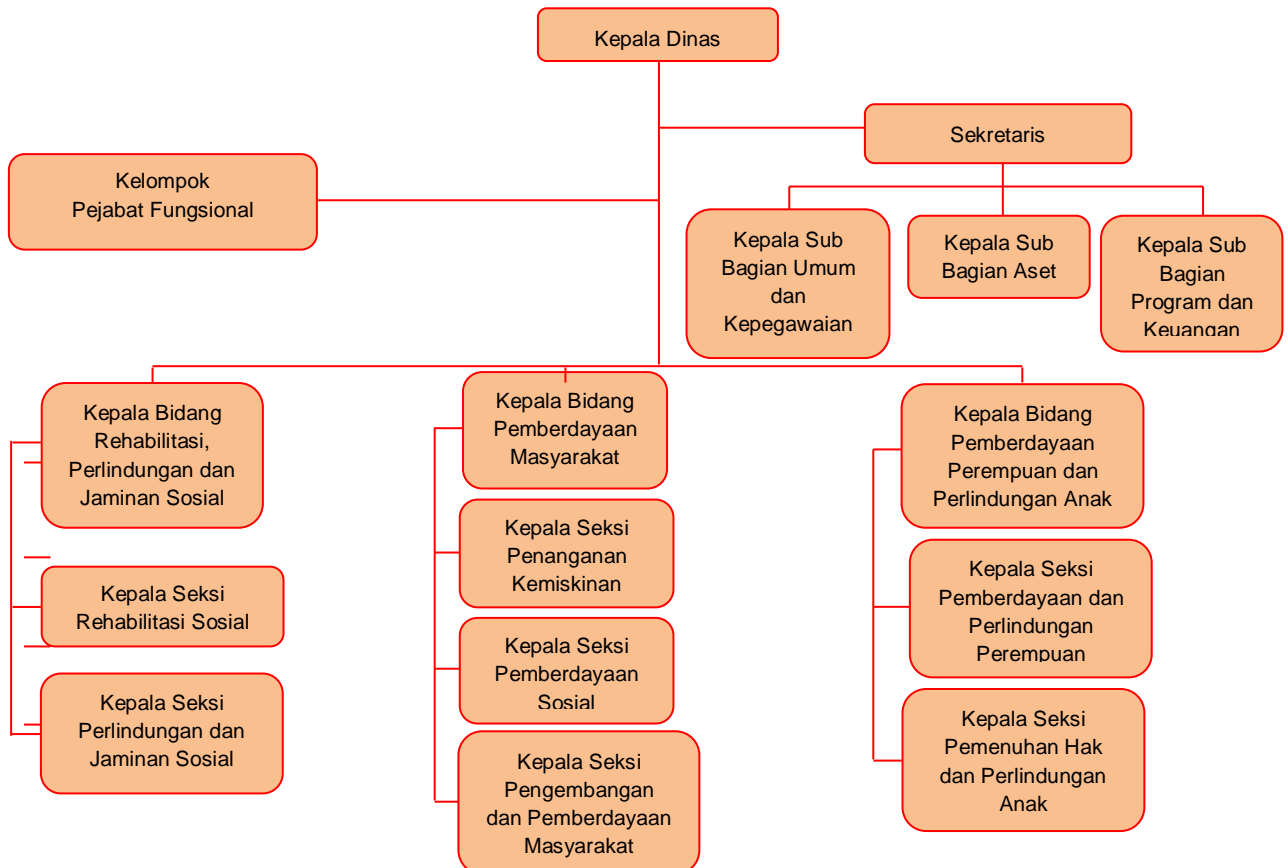
keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender serta penyajian data gender.

2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak; melaksanakan pelembagaan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak; dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penyajian data anak.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 32 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	7	-	12
3	Bidang RPJS	1	3	2	-	6
4	Bidang PM	1	5	2	-	8
5	Bidang PP & PA	1	4	-	-	5
Jumlah		4	16	11	-	32

Sumber : DISSOSPPPA 2017

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	3	-	-	4	1	-	12
3	Bidang RPJS	1	2	1	-	-	2	-	-	6
4	Bidang PM	-	3	1	-	-	4	-	-	8
5	Bidang PP & PA	1	3	-	-	-	1	-	-	5
Jumlah		2	13	5	-	-	11	1	-	32

Sumber : DISSOSPPPA 2017

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia DISSOSPPPA juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Milik DISSOSPPPA Kota Singkawang
Berdasarkan Jenis dan Jumlah Barang Extra Countable

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH	-	0,00	
		01	Tanah	-	0,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		02	Alat-alat Besar	-	0,00	
		03	Alat-alat Angkutan	-	0,00	
		04	Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	0,00	
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	0,00	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	330	123.207.750,00	
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	10	1.350.000,00	
		08	Alat-alat Kedokteran	-	0,00	
		09	Alat-alat Laboratorium	-	0,00	
		10	Alat-alat Keamanan	-	0,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		11	Bangunan Gedung	-	0,00	
		12	Bangunan Monumen	-	0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		13	Jalan dan Jembatan	-	0,00	
		14	Bangunan Air/Irigasi	-	0,00	
		15	Instalasi	-	0,00	
		16	Jaringan	1	385.000,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	-	0,00	
		17	Buku Perpustakaan	-	0,00	
		18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	0,00	
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	0,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0,00	
		20	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

Sumber : DISSOSPPPA 2017

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Milik DISSOSPPPA Kota Singkawang
Berdasarkan Jenis dan Jumlah Barang Intra Countable

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH	2	297.675.208,00	
		01	Tanah	2	297.675.208,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	268	1.156.226.092,00	
		02	Alat-alat Besar	-	0,00	
		03	Alat-alat Angkutan	9	338.472.492,00	
		04	Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	0,00	
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	0,00	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	246	758.538.600,00	
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	13	59.215.000,00	
		08	Alat-alat Kedokteran	-	0,00	
		09	Alat-alat Laboratorium	-	0,00	
		10	Alat-alat Keamanan	-	0,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	8	1.082.890.950,00	
		11	Bangunan Gedung	7	1.012.890.950,00	
		12	Bangunan Monumen	1	70.000.000,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		13	Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		14	Bangunan Air/Irigasi	-	0,00	
		15	Instalasi	1	16.855.000,00	
		16	Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	-	0,00	
		17	Buku Perpustakaan	-	0,00	
		18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	0,00	
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	0,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0,00	
		20	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	0,00	
TOTAL				281	2.702.242.460,00	

Sumber : DISSOSPPPA 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar dan layanan urusan wajib non dasar.

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah disampaikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS Skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	-	40,0	60,0	80,0	90,0	100,0	10,43	9,70	4,91	84,26	93,18	26,08	16,17	6,14	93,62	93,18
2	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	-	40,0	60,0	80,0	90,0	100,0	4,78	5,02	3,03	100,0	100,0	11,95	8,37	3,79	111,1	100,0
3	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	-	-	40,0	60,0	80,0	90,0	100,0	3,70	3,84	2,26	100,0	100,0	9,25	6,40	2,83	111,1	100,0
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	33,07	49,42	54,08	68,75	57,55	33,07	49,42	54,08	68,75	57,55

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo yang memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi	-	-	-	20,0	40,0	40,0	60,0	80,0	83,33	83,33	83,33	83,33	71,43	416,6	208,3	208,3	138,8	89,29
6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	-	-	40,0	60,0	80,0	90,0	100,0	23,08	23,08	26,92	34,62	34,62	57,70	38,47	33,65	38,47	34,62
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,36	10,15	10,16	8,94	8,90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	Rasio KDRT	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,67	0,71	0,93	0,81	0,87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,00	41,30	41,97	42,03	44,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,00	67,00	68,00	72,00	74,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,00	61,00	63,00	69,00	73,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,00	64,00	69,00	71,00	78,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,00	46,00	51,00	58,00	63,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,46	51,61	58,96	63,81	71,75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	Persentase PKK aktif	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Persentase Posyandu aktif	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Uraian	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Sosial	538.476.000	538.728.000	400.574.000	908.446.000	895.251.000	475.549.000	451.484.000	337.124.500	835.146.300	756.615.000	88,31	83,81	84,16	91,93	84,51	10,67	9,72
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122.860.300	234.682.300	179.686.700	237.264.250	258.388.750	111.080.300	229.707.300	176.236.700	232.355.250	248.101.429	90,41	97,88	98,08	97,93	96,02	15,99	17,39
Urusan Pemberdayaan Masyarakat	116.642.000	403.717.750	253.355.200	248.499.450	59.063.700	66.620.000	342.981.750	238.466.200	244.298.550	55.263.700	57,11	84,96	94,12	98,31	93,57	(12,6)	(3,66)

Kemudian masing-masing layanan tersebut disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

a. Sosial

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Sosial di Kota Singkawang selama periode 2013-2017 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Apek Pelayanan Umum dalam Urusan Sosial Kota Singkawang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	10,43	9,70	4,91	84,26	93,18
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	10,43	9,70	4,91	84,26	93,18
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	10,43	9,70	4,91	84,26	93,18
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	6,00	6,38	0,00	1,31	0,66
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	83,33	83,33	83,33	83,33	71,43
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	23,08	23,08	26,92	34,62	34,62
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	4,78	5,02	3,03	100,00	100,00
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	3,70	3,84	2,26	100,00	100,00
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	33,07	49,42	54,08	68,75	57,55

Sumber : DISSOSPPPA 2018

Sarana sosial yang ada di Kota Singkawang pada tahun 2017 sebanyak 12 unit. Dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cenderung fluktuatif. Hal ini terkait permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Singkawang selama periode 2013-2017 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Apek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	10,36	10,15	10,16	8,94	8,90
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	2,81	1,47	3,60	n/a	n/a
4	Rasio KDRT (%)	0,67	0,71	0,93	0,81	0,87
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	37,00	41,30	41,97	42,03	44,00
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	59,00	67,00	68,00	72,00	74,00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	53,00	61,00	63,00	69,00	73,00
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	37,00	41,00	41,00	43,00	47,00

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	59,00	64,00	69,00	71,00	78,00
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	37,00	46,00	51,00	58,00	63,00
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	39,46	51,61	58,96	63,81	71,75
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,93	0,98	1,11	0,98	n/a
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	n/a	59,01	n/a	n/a

Sumber : DISSOSPPPA 2018

c. Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok-kelompok yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2013 semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota.

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Singkawang selama periode 2013-2017 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Apek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	15,63	19,23	19,23	15,63	15,63
3	Persentase LSM aktif (%)	55,04	55,04	55,04	55,04	55,04
4	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DISSOSPPPA 2018

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal, meliputi :

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lima tahun mendatang.

1. Kekuatan (Strength)

Beberapa faktor kekuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan, sebagai contoh setiap perayaan hari besar agama pemerintah secara rutin memberikan bingkisan bagi kaum dhuafa, hal ini melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan sebagian masyarakat memberikan paket bantuan kebutuhan dasar bagi keluarga fakir miskin.
- b. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi yang disandang masing-masing staf, meskipun dengan penganggaran yang minim.

2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga profesional yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal misalnya pada kasus-kasus tertentu baik diuruskan sosial maupun diuruskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan.
 - b. Fasilitas sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan dan rehabilitasi sebagai contoh dalam menangani kasus eks psikotik yang menggelandang dan tidak diberdayakan karena tidak adanya panti atau wadah yang mampu menampung mereka untuk diberdayakan.
- b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah:

1. Peluang (opportunities)

- a. Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Sebagai contoh berperan aktifnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menangani orang mati terlantar serta kasus-kasus lain, sehingga dapat menekan tumbuh kembangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai landasan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi kegiatan tersebut.

2. Ancaman (Threats)

- a. Meningkatnya PMKS di Kota Singkawang, dengan demikian menimbulkan kerentanan akan angka kemiskinan, hal ini merupakan mata rantai kemiskinan yang ada apabila rantai kemiskinan ini tidak diputus.
- b. Kota Singkawang merupakan kota wisata atau kota jasa, seiring perkembangan dan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan

terjadi perpindahan penduduk dari kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Kota Singkawang untuk mencari penghidupan yang layak, hal tersebut akan menimbulkan daerah slum seperti di daerah pasar baru Kelurahan Pasiran dan juga akan meningkatnya PMKS di Kota Singkawang.

c. Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginteraksi faktor-faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - a. Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparaturnya yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah :
 - a. Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
 - b. Memanfaatkan semangat dan motivasi aparaturnya agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul di masyarakat baik masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - a. Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - a. Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- b. Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.

Tabel 2.10
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan - Motivasi yang tinggi dimiliki dari aparatur DISSOSPPPA 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya tenaga professional yang tersedia - Fasilitas sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan antara pemerintah yaitu DISSOSPPPA dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di DISSOSPPPA - Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) DISSOSPPPA sebagai landasan bekerja sesuai masing-masing 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat - Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan - Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial , pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
<p style="text-align: center;"><u>TANTANGAN (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angka PMKS - Kota Singkawang merupakan kota wisata atau kota jasa 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI S + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial - Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur untuk dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul di dalam masyarakat dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial , pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI W + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu dalam penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial - Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan kemajuan diurusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu lima tahun terakhir, disadari masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
4. Belum tersedianya peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
5. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;
6. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya;
7. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
8. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
9. Tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang yang khusus mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak namun hal ini telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perda dimaksud oleh DPRD Kota Singkawang setelah melalui proses hearing dengan DISSOSPAPA Kota Singkawang;

10. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
11. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
12. Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tantangan kedepan bagi pembangunan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS, menyediakan peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum diurusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku. Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui strategi, arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang terpadu, terukur, terarah, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022 menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

- a. **Harmonis** Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **Ekonomi** Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **Bersih, Tegak, Amanah dan Efektif** Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

- d. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan politik dan agama. Hal lain yang menjadi focus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industry local dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam system penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Disamping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan jasa serta PAD dari sektor pariwisata.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019. Visi Kementerian Sosial adalah:

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong ”.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional (2015-2019) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat.

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marjinal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; dan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin, kelompok rentan, dan PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
 - a. meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kementerian PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Misi Kementerian PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumber daya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Misi Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rumusan Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PPPA.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing :

Tujuan 1 :

Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2 :

Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3 :

Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan :
 - Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- b. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan :
 - Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut :

- a. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan :
 - Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.

- b. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran :
 - Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
 - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
- c. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan :
 - Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
- d. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian PPPA yang professional dan kompetitif;
- e. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
- f. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- 6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 adalah *“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat”* dan Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas hidup, bantuan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana alam;
5. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial/Masyarakat serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menggariskan bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk pelaksanaan tugas dekonsentrasi memiliki fungsi Perlindungan Sosial sebagai berikut:

1. Pencegahan, mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat;
2. Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya;
4. Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Adapun terdapat beberapa sasaran program yang merupakan arah kebijakan Kementerian Sosial RI untuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan tugas Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 Halaman 44 dekonsentrasi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat;
2. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang;
3. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga;
4. Pemberdayaan Perempuan;
5. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
6. Bantuan Perumahan;
7. Bantuan dan Jaminan Sosial;
8. Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial;
9. Perlindungan Sosial Lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperlukan kepekaan sosial mengedepankan hal-hal yang menyangkut skala prioritas dan berbagai isu nasional dan memperhatikan kondisi logis permasalahan di daerah, maka berbagai program kebijakan mutlak dibangun dengan harapan terjadinya sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Tahun 2008-2028 dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah periode 2013-2018 adalah penanganan masalah PMKS yang terus berkembang dengan mengedepankan 4 (pilar) program, seperti :

1. Pemberdayaan Sosial dan Pengentasan Masalah Kemiskinan;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dari berbagai isu tersebut diatas maka menjadi keharusan untuk memprogramkan bentuk kegiatan yang merupakan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 menuju visi dan capaian target sasaran untuk mendorong seluruh penanganan PMKS agar dapat terselesaikan secara periodik, terarah dan sistematis sesuai dengan harapan.

3.3.5. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 adalah *"Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera Melalui Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak"*. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur;
2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 sampai 5 tahun). Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatnya tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur;
2. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan;
4. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semester atau tahunan. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatnya profesionalisme sumberdaya aparatur dalam tugas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kebijakan yang responsif gender dan meningkatnya perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan serta terlindunginya perempuan dari tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
4. Meningkatnya kesejahteraan anak dan terlindunginya anak dari tindak kekerasan.

Strategi merupakan cara yang digunakan atau yang akan diterapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai visi yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan masing-masing misi. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

Strategi Misi 1

- a. Memberikan kesempatan kepada aparatur guna meningkatkan kapasitasnya serta semaksimal mungkin meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor;

Strategi Misi 2

- b. Meningkatkan peran serta aktif perempuan dalam setiap tahap proses pembangunan;

Strategi Misi 3

- c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan secara fisik maupun psikis sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Strategi Misi 4

- d. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak secara fisik maupun psikis sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparat melalui kesempatan mengikuti bimtek, diklat dan peningkatan jenjang pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja;
2. Meningkatkan taraf pendidikan perempuan;
3. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan;
4. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

3.3.6. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah *"Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Kalimantan Barat"*. Visi tersebut diwujudkan melalui 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat;
2. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan ;
3. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana kantor, menyelaraskan berbagai rencana kegiatan, serta meningkatkan profesionalisme aparatur.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya keberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa di Kalimantan Barat.

Strategi : Peningkatan kompetensi SDM masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini,yaitu:

- a. Peningkatan pemahaman dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat;
- b. Pengawasan terhadap usaha bidang ekonomi kerakyatan.

Sasaran 2

Berkembangnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Strategi : Percepatan penyediaan data dan intensifkan pembinaan, serta koordinasi.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini,yaitu:

- a. Pengumpulan data secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan;
- c. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa.

Sasaran 3

Meningkatnya kinerja aparatur.

Strategi :Percepatan penyediaan data pelaporan, pembinaan dan koordinasi.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini,yaitu:

- a. Pengumpulan data dan pelaporan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan;
- c. Koordinasi intern dan ekstern antar Perangkat Daerah.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintahan daerah yang tidak selaras dan sejalan dengan isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam memahami dan merumuskan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam merumuskan isu-isu strategis yaitu hasil telaah dan analisis terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan harus selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Terkait dengan hal tersebut maka data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan isu-isu strategis antara lain :

- a. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- b. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- c. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- d. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

3.4.1. Isu Strategis Pada Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dengan isu strategisnya antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
4. Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
5. Belum tersedianya peraturan/kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

3.4.2. Isu Strategis Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa kendala yang telah dianalisis isu strategisnya dan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
2. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
3. Tidak adanya Peraturan Daerah Kota Singkawang (PERDA) yang khusus mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak namun hal ini telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perda dimaksud oleh DPRD Kota Singkawang setelah melalui proses hearing dengan DISSOSPPPA Kota Singkawang;
4. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap.

3.4.3. Isu Strategis Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2017 masih menghadapi beberapa kendala dan telah dianalisis isu strategisnya antara lain :

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;
2. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Berkaitan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Singkawang terkait dengan pernyataan Misi untuk kurun waktu selama (lima) tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1, yaitu "Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya"

Untuk mencapai target Misi 1, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran. Dengan rumusan sasaran :
 - Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
 - Terbinanya pengembangan potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan.
- b. Mewujudkan pengembangan dan kelestarian budaya. Dengan rumusan sasaran :
 - Meningkatnya pengembangan dan kelestarian budaya.

2. Misi 2, yaitu "Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri"

Untuk mencapai target Misi 2, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM yang handal dan mandiri. Dengan rumusan sasaran :
 - Meningkatnya kemandirian dan kehandalan Koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan rumusan sasaran :

- Meningkatnya produktivitas industri lokal.
- c. Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan. Dengan rumusan sasaran:
 - Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif;
 - Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
- d. Meningkatkan penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial.

3. Misi 3 yaitu "Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat"

Untuk mencapai target Misi 3, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya produksi pertanian dan terwujudnya ketahanan pangan;
 - Meningkatnya produksi perikanan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan rumusan sasaran :
 - Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

4. Misi 4, yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegak, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi"

Untuk mencapai target Misi 4, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan rumusan sasaran:
 - Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
- b. Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dengan rumusan sasaran :
 - Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah;
 - Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
 - Terlaksananya sistem pengawasan yang efektif dan efisien;

- Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

5. Misi 5, yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas"

Untuk mencapai target Misi 5, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatkan kualitas pendidikan;
 - Meningkatkan minat baca masyarakat.
- c. Meningkatkan pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga. Dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatkan kualitas dan peran pemuda;
 - Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga.

6. Misi 6, yaitu "Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan"

Untuk mencapai target Misi 6, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan. Dengan rumusan sasaran:
 - Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

7. Misi 7, yaitu "Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata"

Untuk mencapai target Misi 7, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa;
 - Meningkatkan PAD sektor pariwisata.

Berdasarkan paparan Misi kepala daerah dan Uraian Tujuan diatas maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu misi kedua dengan tujuannya yang keempat.

Misi ke-2 : *"Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri"*.

Tujuan ke-4 : *"Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial"*.

Dengan rumusan sasaran : *"Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial"*.

Untuk memberikan gambaran informasi tentang keterkaitan antara Visi, Misi dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Keterkaitan Antara Visi, Misi dengan Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Visi : Singkawang HEBAT 2022

No	Misi Ke-2	Tujuan Ke-4	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Per Tahun					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00

Sumber : RPJMD 2018-2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi dan Arah Kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal lingkungan pembangunan.

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang sesuai dengan tugas pembantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022		
Misi Ke-2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Memberikan fasilitasi dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin
		Pembinaan keterampilan PMKS
		Memberikan dukungan berupa fasilitasi terhadap lembaga pengelola PMKS
		Memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan
		Pembinaan keterampilan perempuan dalam meningkatkan kemandiriannya
		Meningkatkan kinerja lembaga perlindungan anak

Sumber : RPJMD 2018-2022

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2018-2022 dipadukan dalam matriks kebijakan berikut ini :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
Misi Ke-2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Memberikan fasilitasi dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) - Penyaluran paket dhuafa
		Pembinaan keterampilan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pelatihan usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
		Memberikan dukungan berupa fasilitasi terhadap lembaga pengelola PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat - Pemberdayaan Karang Taruna - Bimbingan kerjasama & penguatan kelembagaan pengelola PMKS - Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial skala kota
		Memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) - Peningkatan Kapasitas FAD - Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Anak Integratif
		Pembinaan keterampilan perempuan dalam meningkatkan kemandiriannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga - Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender - Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan
		Meningkatkan kinerja lembaga perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Karakter dan Kreativitas Anak - Perlindungan Anak Terpadu

Sumber : RPJMD 2018-2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022 merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan agar pencapaian visi terarah, efektif dan efisien.

Selanjutnya program pembangunan daerah diterjemahkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam bentuk kegiatan dalam upaya *outcome* program pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Uraian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Urusan Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - a. Pembinaan Pelatihan dan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa
 - c. Fasilitasi Pembentukan e-warong KUBE Jasa
 - d. Fasilitasi pendampingan KUBE Jasa dan e-warong
 - e. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (KUBE)
 - f. Pelatihan usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 - h. Penyaluran paket dhuafa
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - a. Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
 - b. Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas berat

- c. Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak Berdaya
 - d. Peningkatan Penanganan dan Rehabilitasi Terhadap Lanjut Usia (Lansia) Melalui Home Visit
 - e. Verifikasi dan Validasi Peserta PBI BPJS Kesehatan
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Panti
 - g. Pembinaan Klien Orang Disabilitas Yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - h. Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - i. Verifikasi dan Validasi Data Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik
 - j. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
 - k. Pelayanan Bagi Orang Telantar dan Eks Pasien RSJ
 - l. Pembinaan Klien PMKS Yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan di LKS
 - m. Pemberian Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
 - n. Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
 - o. Pencegahan dan Pembinaan Terhadap Wilayah Rawan Konflik Sosial
3. Program Pembinaan Anak terlantar
 - a. Penanganan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
 - b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
 - c. Pembinaan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan
 - d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Fakir Miskin Terlantar dan Anak Orang Tidak Mampu
 - e. Peningkatan Keterampilan Kerja Bagi ABH
 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - a. Penyuluhan Bagi Penyandang Penyakit Sosial
 - b. Penyuluhan Program Kebijakan Bidang Sosial
 - c. Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - a. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- b. Bulan Bakti Karang Taruna
 - c. Pemberdayaan Karang Taruna
 - d. Bimbingan Teknis Karang Taruna
 - e. Peningkatan Kelembagaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif
 - f. Peningkatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Dalam Kesejahteraan Sosial
 - g. Bimbingan Sosial Dasar PSM
 - h. Bimbingan Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan WKSBM
 - i. Penguatan Operasional Kegiatan LK3
 - j. Penguatan Operasional Kegiatan Lembaga Peduli Keluarga/FCU
 - k. Peningkatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - l. Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Daerah Rawan Bencana
 - m. Penyebaran Informasi Kegiatan Sosial Melalui Aplikasi Media Sosial
6. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial
- a. Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - b. Peningkatan Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c. Kebijakan Peraturan Bidang Sosial
 - d. Kebijakan Peraturan Urusan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - e. Bimbingan Teknis Jejaring Kerja TKSK
 - f. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - g. Fasilitasi Pendampingan Sistem Layanan Rujukan Terpadu
 - h. Updating Data PMKS dan PSKS
 - i. Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
7. Program Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 - b. Santunan Bagi Veteran dan Perintis Kemerdekaan
 - c. Pembinaan Wawasan Kepahlawanan Bagi Generasi Muda

8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Skala Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Panti Sesuai Standar Pelayanan

B. Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - a. Advokasi dan Fasilitasi Shelter Bagi Perempuan
 - b. Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (Hari Kartini dan Hari Ibu)
 - c. Pelatihan Peningkatan Keterampilan untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga
 - d. Penyuluhan Kepada Kepala Rumah Tangga Untuk Membangun Keluarga Sejahtera
 - e. Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender
 - f. Repitalisasi Gerakan Sayang Ibu
 - g. Pelatihan Kepada Petugas Bimbingan Rohani dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - h. Pelatihan Kepada Petugas Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - i. Pelatihan Keterampilan Bagi Korban KDRT dan Trafficking
2. Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)
 - a. Rakor Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - b. Pelatihan PUG Melalui PPRG
3. Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - a. Peningkatan Kapasitas FAD
 - c. Rakor Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Pembelajaran Untuk Pemantapan KLA
 - d. Peningkatan Kapasitas Pendidik Sekolah Ramah Anak
 - e. Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Anak Integratif
 - f. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Regenerasi Forum Anak)

- g. Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (Hari Anak Nasional)
- h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak
- i. Pembinaan Karakter dan Kreativitas Anak Dalam Mendorong Terwujudnya Kota Layak Anak (KLA)
- j. Perlindungan Anak Terpadu
- k. Pengembangan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

C. Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah
- 2. Program Pengembangan Kelompok Masyarakat
 - a. Pemberdayaan Kelurahan Siaga Aktif
 - b. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera
 - c. Pembinaan P2WKSS Kelurahan Unggulan
 - d. Lomba Kelurahan Tingkat Kota
 - e. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
 - f. Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
 - g. Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - h. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan
 - i. Pembinaan Peningkatan Pos Pelayanan Teknologi
 - j. Pembinaan Karang Taruna
 - k. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

D. Program dan Kegiatan Non Urusan (Penunjang Urusan Lainnya)

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - m. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
 - n. Penataan dan Inventarisasi Aset
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan LAKIP PD
 - d. Penyusunan Renstra PD
 - e. Penyusunan LPPD / LKPJ
 - f. Penyusunan Profil PD
 - g. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)
 - h. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah
 - i. Penyusunan Renja PD

5. Program Penguatan Transparansi Publik
 - a. Expo Kinerja PD
6. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
 - a. Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang

Adapun uraian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
MISI KE-2	MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG HANDAL, KREATIF DAN MANDIRI																
Tujuan Ke-4	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial																
Sasaran Ke-1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	65,34%	66%		67%		68%		69%		70%		70%			
1.06.	SOSIAL				704.455.000		1.248.890.000		2.049.360.000		2.356.920.000		2.400.560.000		8.760.185.000		
1.06.1.06.0 1.015.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin yang Diberdayakan	40%	43%	33.867.000	48%	185.200.000	53%	440.900.000	58%	596.720.000	63%	602.660.000	63%	1.859.347.000	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.015.006.	Pembinaan Pelatihan dan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penanganan pembinaan dan pelatihan pengembangan UEP bagi orang dengan HIV dan AIDS	1006 ODHA	5 ODHA	-	20 ODHA	10.000.000	20 ODHA	50.000.000	20 ODHA	50.000.000	20 ODHA	50.000.000	85 ODHA	160.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Jumlah penanganan pembinaan dan Pelatihan pengembangan UEP bagi orang dengan Kecacatan/disabilitas	249 Org Disabilitas	5 Disabilitas	-	20 Disabilitas	10.000.000	20 Disabilitas	50.000.000	20 Disabilitas	50.000.000	20 Disabilitas	50.000.000	85 Disabilitas	160.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah penanganan pembinaan dan pelatihan pengembangan UEP bagi lanjut usia produktif	312 Jiwa Lansia Produktif	50 Jiwa Lansia Produktif	-	20 Jiwa Lansia Produktif	10.000.000	20 Jiwa Lansia Produktif	50.000.000	20 Jiwa Lansia Produktif	50.000.000	20 Jiwa Lansia Produktif	50.000.000	130 Jiwa Lansia Produktif	160.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah Penanganan pembinaan dan pelatihan pengembangan UEP bagi korban penyalahgunaan Napza.	533 Jiwa Eks Napza	50 Jiwa Eks Napza	-	20 Jiwa Eks Napza	10.000.000	20 Jiwa Eks Napza	50.000.000	20 Jiwa Eks Napza	50.000.000	20 Jiwa Eks Napza	50.000.000	130 Jiwa Eks Napza	160.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah Penanganan pembinaan dan pelatihan pengembangan UEP bagi bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	121 Jiwa BWBLP	50 Jiwa BWBLP	-	20 Jiwa BWBLP	10.000.000	20 Jiwa BWBLP	50.000.000	20 Jiwa BWBLP	50.000.000	20 Jiwa BWBLP	50.000.000	130 Jiwa BWBLP	160.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.015.009.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah penanganan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu	-	8 KUBE jasa PKH, 2 KUBE Jsa KPS dengan 100 KPM	33.867.000	40 KUBE 400 KPM	35.200.000	40 KUBE 400 KPM	40.000.000	40 KUBE 400 KPM	50.000.000	40 KUBE 400 KPM	50.000.000	40 KUBE 400 KPM	209.067.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.015.xxx.	Fasilitasi Pembentukan e-warong KUBE Jasa	Jumlah Penanganan peningkatan ekonomi melalui e-warong KUBE Jasa	-	10 e-warong KUBE Jasa	0	10 e-warong KUBE Jasa	0	10 e-warong KUBE Jasa	0	10 e-warong KUBE Jasa	30.000.000	10 e-warong KUBE Jasa	30.000.000	10 e-warong KUBE Jasa	60.000.000	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.015.xxx.	Fasilitasi Pendampingan KUBE Jasa dan e-warong	Jumlah pendamping KUBE Jasa dan e-warong	-	5 pendamping kota, 10 pendamping KUBE Jasa dan e-warong	0	5 pendamping kota, 40 pendamping KUBE Jasa dan e-warong	100.000.000	5 pendamping kota, 10 pendamping KUBE Jasa dan e-warong	110.000.000	5 pendamping kota, 10 pendamping KUBE Jasa dan e-warong	120.000.000	5 pendamping kota, 10 pendamping KUBE Jasa dan e-warong	120.000.000	5 pendamping kota, 10 pendamping KUBE Jasa dan e-warong	450.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.015.xxx.	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (KUBE)	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh Bimbingan Sosial KUBE	-	100 orang peserta KUBE	0	100 orang peserta KUBE	0	100 orang peserta KUBE	0	100 orang peserta KUBE	30.000.000	100 orang peserta KUBE	30.000.000	500 orang peserta KUBE	60.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.015.xxx.	Pelatihan Usaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah WRSE yang memperoleh Bimbingan Sosial	-	30 orang WRSE dari 5.088 orang	0	30 orang WRSE dari 5.088 orang	0	30 orang WRSE dari 5.088 orang	0	30 orang WRSE dari 5.088 orang	30.000.000	30 orang WRSE dari 5.088 orang	30.000.000	150 orang WRSE dari 5.088 orang	60.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.015.xxx.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah WRSE yang memperoleh bantuan usaha	-	30 orang WRSE dari 5.088 orang	0	30 orang WRSE dari 5.088 orang	0	30 orang WRSE dari 5.088 orang	0	30 orang WRSE dari 5.088 orang	30.000.000	30 orang WRSE dari 5.088 orang	30.000.000	150 orang WRSE dari 5.088 orang	60.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.015.xxx.	Penyaluran Paket Dhuafa	Jumlah PMKS yang memperoleh paket Hari Raya keagamaan	-	10.000 paket	0	10.000 paket	0	10.000 paket	40.900.000	10.000 paket	56.720.000	10.000 paket	62.660.000	50.000 paket	160.280.000	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.016.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	40%	50%	447.992.000	55%	441.590.000	60%	499.210.000	70%	655.060.000	80%	665.160.000	80%	2.709.012.000	DISSOSP3A
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	30%	55%		60%		65%		75%		75%		75%		
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	45%	55%		60%		65%		75%		75%		75%		
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	40%	50%		55%		60%		70%		75%		75%		
		Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	40%	50%		55%		60%		70%		85%		85%		
		Persentase penanganan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	40%	50%		55%		60%		70%		80%		80%		
1.06.1.06.0 1.016.010.	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah anggota Tagana yang melaksanakan penanganan tanggap darurat dan peningkatan kapasitas TAGANA	30 Orang Tagana	30 Orang Tagana	45.750.000	30 Orang Tagana	45.000.000	30 Orang Tagana	50.000.000	30 Orang Tagana	60.000.000	30 Orang Tagana	65.000.000	30 Orang Tagana	265.750.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat bencana	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	0	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	0	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	0	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	10.000.000	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	10.000.000	1 Unit Mobil Resque 1 Unit Motor roda dua	20.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah orang terlanjar, korban trafficking, dan orang pekerja migran terlanjar serta orang terlanjar yang meninggal dunia yang mendapatkan pelayanan	6 Orang Terlanjar 7 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 1 Org Meninggal dunia terlanjar	10 Orang Terlanjar 7 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 5 Org Meninggal dunia terlanjar	12.000.000	10 Orang Terlanjar 7 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 5 Org Meninggal dunia terlanjar	12.000.000	10 Orang Terlanjar 7 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 5 Org Meninggal dunia terlanjar	15.000.000	10 Orang Terlanjar 7 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 5 Org Meninggal dunia terlanjar	17.000.000	10 Orang Terlanjar 7 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 5 Org Meninggal dunia terlanjar	17.000.000	50 Orang Terlanjar 35 Orang korban Trafficking dan pekerja migran terlanjar 25 Org Meninggal dunia terlanjar	73.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah Pendampingan pengembalian orang terlanjar	1 Orang Pendamping	1 Org Pendamping	0	1 Org Pendamping	0	1 Org Pendamping	0	1 Org Pendamping	3.000.000	1 Org Pendamping	3.000.000	1 Org Pendamping	6.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantaran berat	5 KK FM	5 KK FM	7.500.000	5 KK FM	0	10 KK FM	0	10 KK FM	10.000.000	10 KK FM	10.000.000	40 KK FM	27.500.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah estimasi korban bencana dan pasca bencana yang menerima bantuan tanggap darurat	36 KK BA Angin Puting Beliung 6 KK BS Kebakaran 1 Org BA Banjir Meninggal	125 KK atau 625 Jiwa Korban Bencana	50.009.000	125 KK atau 625 Jiwa Korban Bencana	45.000.000	125 KK atau 625 Jiwa Korban Bencana	45.000.000	125 KK atau 625 Jiwa Korban Bencana	50.000.000	125 KK atau 625 Jiwa Korban Bencana	50.000.000	125 KK atau 625 Jiwa Korban Bencana	240.009.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.016.013.	Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Berat	Jumlah petugas pendamping jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	13.003.000	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	10.000.000	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	14.210.000	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	15.060.000	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	16.000.000	8 Org Pemand ping 67 ODK/ ASPBD	68.273.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.014.	Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak Berdaya	Jumlah petugas pendamping jaminan sosial bagi lanjut usia tidak berdaya	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	18.696.000	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	19.590.000	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	20.000.000	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	20.000.000	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	20.000.000	12 Org Pemand ping 145 Org Lansia	98.286.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.015.	Peningkatan Penanganan dan Rehabilitasi Terhadap Lanjut Usia (Lansia) Melalui Home Visit	Jumlah lansia terlantar yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan serta rehabilitasi sosial	50 Orang Lansia Terlantar	50 Orang Lansia Terlantar	0	60 Orang Lansia Terlantar	10.000.000	70 Orang Lansia Terlantar	15.000.000	75 Orang Lansia Terlantar	20.000.000	80 Orang Lansia Terlantar	20.000.000	80 Orang Lansia Terlantar	65.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.016.	Verifikasi dan Validasi Peserta PBI BPJS Kesehatan	Jumlah petugas verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	62 petugas verifikasi dan validasi data, 2 petugas input data	67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	70.900.000	67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	70.000.000	67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	75.000.000	67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	80.000.000	67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	80.000.000	67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	375.900.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.018.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Panti	Jumlah Kelayan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial di dalam Shelter	10 Kasus PMKS	5 Kasus PMKS	25.464.500	8 Kasus PMKS	20.000.000	10 Kasus PMKS	30.000.000	12 Kasus PMKS	33.000.000	12 Kasus PMKS	37.160.000	12 Kasus PMKS	145.624.500	Shelter Harmoni Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1.06.1.06.0 1.016.019.	Pembinaan Klien Orang Disabilitas Yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah Orang Dengan Kecacatan (ODK) produktif yang menerima pelatihan di LKS	Belum ada	Belum ada	0	5 ODK	10.000.000	5 ODK	15.000.000	5 ODK	17.000.000	5 ODK	17.000.000	20 ODK	59.000.000	LKS Penyandang Disabilitas Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.020.	Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah petugas verifikasi dan validasi Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	71 petugas verifikasi dan validasi data	71 petugas verifikasi dan validasi data	84.058.500	71 petugas verifikasi dan validasi data	80.000.000	71 petugas verifikasi dan validasi data	85.000.000	71 petugas verifikasi dan validasi data	90.000.000	71 petugas verifikasi dan validasi data	90.000.000	71 petugas verifikasi dan validasi data	429.058.500	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.021.	Verifikasi dan Validasi Data Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik	Jumlah petugas verifikasi dan validasi Data Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik	58 petugas verifikasi dan validasi data	58 petugas verifikasi dan validasi data	0	58 petugas verifikasi dan validasi data	0	58 petugas verifikasi dan validasi data	0	58 petugas verifikasi dan validasi data	0	58 petugas verifikasi dan validasi data	0	58 petugas verifikasi dan validasi data	0	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.022.	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	Jumlah petugas verifikasi dan validasi Data Kemiskinan	-	73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayan	70.000.000	73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayan	70.000.000	73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayan	75.000.000	73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayan	80.000.000	73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayan	80.000.000	73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayan	375.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.023.	Pelayanan Bagi Orang Telantar dan Eks Pasien RSJ	Jumlah Eks Pasien RSJ terlantar yang mendapatkan pelayanan	90 Jiwa Eks Psikotik	40 Eks Pasien RSJ terlantar	50.611.000	40 Eks Pasien RSJ terlantar	50.000.000	40 Eks Pasien RSJ terlantar	60.000.000	40 Eks Pasien RSJ terlantar	50.000.000	40 Eks Pasien RSJ terlantar	50.000.000	40 Eks Pasien RSJ terlantar	260.611.000	RSJ Bagak Sahwa

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		Jumlah penanganan pelayanan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dalam operasi ketertiban umum	-	-	0	30 ODGJ / Penyang dang Disabili tas Mental	0	30 ODGJ / Penyang dang Disabili tas Mental	0	30 ODGJ / Penyang dang Disabili tas Mental	50.000.000	30 ODGJ / Penyang dang Disabili tas Mental	50.000.000	120 ODGJ / Penyang dang Disabilitas Mental	100.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.xxx.	Pembinaan Klien PMKS Yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan di LKS	Jumlah Klien PMKS yang mengikuti Pelatihan dan Keterampilan di LKS	5 Orang PMKS	10 Orang PMKS	0	10 Orang PMKS	0	10 Orang PMKS	0	10 Orang PMKS	20.000.000	10 Orang PMKS	20.000.000	50 Orang PMKS	40.000.000	LKS di Kota Singkawang yang sesuai dengan jenis PMKS
1.06.1.06.0 1.016.xxx.	Pemberian Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah alat bantu yang diterima oleh Penyandang Disabilitas	97 Penyandang Disabilitas	10 Penyandang Disabilitas	0	10 Penyandang Disabilitas	0	10 Penyandang Disabilitas	0	10 Penyandang Disabilitas	30.000.000	10 Penyandang Disabilitas	30.000.000	50 Penyandang Disabilitas	60.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.xxx.	Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina di Luar Panti	-	-	0	10 Gelandangan dan Pengemis	0	10 Gelandangan dan Pengemis	0	10 Gelandangan dan Pengemis	0	10 Gelandangan dan Pengemis	0	40 Gelandangan dan Pengemis	0	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.016.xxx.	Pencegahan dan Pembinaan Terhadap Wilayah Rawan Konflik Sosial	Jumlah TOGA, TOMAS dan Pelopor Perdamaian	-	-	0	50 TOGA, TOMAS dan Pelopor Perdamaian	0	50 TOGA, TOMAS dan Pelopor Perdamaian	0	50 TOGA, TOMAS dan Pelopor Perdamaian	0	50 TOGA, TOMAS dan Pelopor Perdamaian	0	50 TOGA, TOMAS dan Pelopor Perdamaian	0	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.017.	Program Pembinaan Anak terlantar	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	30%	55%	12.922.000	60%	65.180.000	65%	115.440.000	75%	115.710.000	75%	115.980.000	75%	425.232.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.017.007.	Penanganan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah Penanganan Kasus ABH	21 Kasus ABH	21 Kasus ABH	12.922.000	25 Kasus ABH	15.180.000	30 Kasus ABH	19.440.000	30 Kasus ABH	19.710.000	30 Kasus ABH	19.980.000	136 Kasus ABH	87.232.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1.06.1.06.0 1.017.xxx.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak yang mendapatkan aksesibilitas pelayanan sosial dan kebutuhan dasar	-	10 Anak	0	10 Anak	10.000.000	10 Anak	15.000.000	10 Anak	15.000.000	10 Anak	15.000.000	50 Anak	55.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah anak yang teradvokasi dalam memperoleh hak identitas diri bagi anak terlantar	-	10 Anak	0	10 Anak	0	10 Anak	10.000.000	10 Anak	10.000.000	10 Anak	10.000.000	50 Anak	30.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.017.xxx.	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Jumlah anak yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	40 Anak terlibat Ngelem dan punk	20 Anak terlibat Ngelem dan punk	0	20 Anak terlibat Ngelem dan punk	10.000.000	20 Anak terlibat Ngelem dan punk	26.000.000	20 Anak terlibat Ngelem dan punk	26.000.000	20 Anak terlibat Ngelem dan punk	26.000.000	100 Anak terlibat Ngelem dan punk	88.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.017.xxx.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Fakir Miskin Terlantar dan Anak Orang Tidak Mampu	Jumlah anak fakir miskin dan anak orang tidak mampu terlantar yang mendapatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar (Paket Bantuan Pendidikan)	-	20 Anak	0	20 Anak	10.000.000	20 Anak	20.000.000	20 Anak	20.000.000	20 Anak	20.000.000	100 Anak	70.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.017.xxx.	Peningkatan Keterampilan Kerja Bagi ABH	Jumlah anak titipan lembaga hukum untuk peningkatan keterampilan kerja	-	-	0	5 Anak	20.000.000	5 Anak	25.000.000	5 Anak	25.000.000	6 Anak	25.000.000	21 Anak	95.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.020.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	40%	50%	15.680.000	55%	57.990.000	60%	59.150.000	70%	60.340.000	75%	61.540.000	75%	254.700.000	DISSOSP3A

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.020.007.	Penyuluhan Bagi Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah sasaran garapan yang rawan terhadap penyakit sosial	3 jenis permasalahan sosial di 3 lokasi	26 Kelurahan	15.680.000	26 Kelurahan	25.000.000	26 Kelurahan	26.000.000	26 Kelurahan	26.000.000	26 Kelurahan	26.000.000	26 Kelurahan	118.680.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.020.xxx.	Penyuluhan Program Kebijakan Bidang Sosial	Jumlah pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, tomas, toga terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	16.495.000	26 Kelurahan	16.575.000	26 Kelurahan	17.170.000	26 Kelurahan	17.770.000	26 Kelurahan	68.010.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.020.xxx.	Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	16.495.000	26 Kelurahan	16.575.000	26 Kelurahan	17.170.000	26 Kelurahan	17.770.000	26 Kelurahan	68.010.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	20%	30%	14.445.000	35%	136.730.000	40%	256.010.000	45%	243.850.000	50%	263.270.000	50%	914.305.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.021.003.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah SDM Kessos/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan	-	500 SDM/ 26 kelurahan	14.445.000	500 SDM/ 26 kelurahan	16.730.000	500 SDM/ 26 kelurahan	20.000.000	500 SDM/ 26 kelurahan	20.000.000	500 SDM/ 26 kelurahan	20.000.000	500 SDM/ 26 kelurahan	91.175.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Bulan Bakti Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna dalam melaksanakan Kesejahteraan Sosial secara bersama	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	5.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	35.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang Dibina	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	5.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	35.000.000	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Bimbingan Teknis Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	5.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	26 Kelurahan	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	35.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Peningkatan Kelembagaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah LKS sebagai contoh kemandirian dalam berusaha berdasarkan kelembagaan	-	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	0	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	10.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	15.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	15.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	15.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	55.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Peningkatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Dalam Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Lembaga Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	0	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	10.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	15.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	15.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	15.000.000	26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSBM, 13 LKS	55.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Bimbingan Sosial Dasar PSM	Jumlah PSKS dalam melayani PMKS	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	15.000.000	26 Kelurahan	15.000.000	26 Kelurahan	15.000.000	26 Kelurahan	55.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Bimbingan Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan WKSBM	Jumlah WKSBM yang mendapatkan bimbingan dan penguatan	-	26 Kelurahan	0	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	15.000.000	26 Kelurahan	10.000.000	26 Kelurahan	15.000.000	26 Kelurahan	50.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Penguatan Operasional Kegiatan LK3	Jumlah LK3 yang mendapat penguatan operasional.	-	6 LK3	0	6 LK3	5.000.000	6 LK3	10.000.000	6 LK3	10.000.000	6 LK3	10.000.000	6 LK3	35.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Penguatan Operasional Kegiatan Lembaga Peduli Keluarga/FCU	Jumlah Lembaga Peduli Keluarga /FCU yang mendapat penguatan operasional	-	6 LK3, 26 FCU	0	6 LK3, 26 FCU	10.000.000	6 LK3, 26 FCU	15.000.000	6 LK3, 26 FCU	15.000.000	6 LK3, 26 FCU	15.000.000	6 LK3, 26 FCU	55.000.000	Kota Singkawang
		Jumlah fasilitas sarana prasarana penanganan masalah keluarga	-	1 unit mobil	0	1 unit mobil	5.000.000	1 unit mobil	46.000.000	1 unit mobil	46.000.000	1 unit mobil	53.000.000	1 unit mobil	150.000.000	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Peningkatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga pengelola Askesos yang mengikuti Pelatihan	5 Lembaga Askesos	5 Lembaga Askesos	0	2 Lembaga Askesos	5.000.000	2 Lembaga Askesos	10.000.000	2 Lembaga Askesos	10.000.000	2 Lembaga Askesos	10.000.000	5 Lembaga Askesos	35.000.000	5 Kelurahan di Kota Singkawang
		Jumlah pendamping dan pengurus Forum Keserasian Sosial (FKS) berbasis masyarakat yang mengikuti Pelatihan	15 Lembaga FKS	15 Lembaga FKS	0	5 Lembaga FKS	5.000.000	5 Lembaga FKS	10.000.000	5 Lembaga FKS	10.000.000	5 Lembaga FKS	10.000.000	15 Lembaga FKS	35.000.000	3 Kecamatan di Kota Singkawang
		Jumlah pengurus Kelembagaan Disabilitas yang mengikuti bimbingan manajemen kelembagaan	3 Kelembagaan Disabilitas	3 Kelembagaan Disabilitas	0	3 Kelembagaan Disabilitas	10.000.000	3 Kelembagaan Disabilitas	15.000.000	3 Kelembagaan Disabilitas	15.000.000	3 Kelembagaan Disabilitas	15.000.000	3 Kelembagaan Disabilitas	55.000.000	Kota Singkawang
		Jumlah pengurus Kelembagaan Lansia yang mengikuti bimbingan manajemen kelembagaan	2 Kelembagaan Lansia	2 Kelembagaan Lansia	0	2 Kelembagaan Lansia	5.000.000	2 Kelembagaan Lansia	10.000.000	2 Kelembagaan Lansia	10.000.000	2 Kelembagaan Lansia	10.000.000	2 Kelembagaan Lansia	35.000.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah lokasi pembentukan KSB di daerah rawan bencana	2 KSB	2 KSB	0	1 KBS	10.000.000	1 KBS	15.000.000	1 KBS	15.000.000	1 KBS	15.000.000	4 KBS	55.000.000	4 Kelurahan di Kota Singkawang
		Jumlah kegiatan sosialisasi kesiagaan tanggap darurat terhadap Ketua RT dilingkungan daerah rawan bencana	681 RT Se-Kota Singkawang	150 RT daerah Rawan Bencana	0	150 RT daerah Rawan Bencana	0	150 RT daerah Rawan Bencana	15.010.000	150 RT daerah Rawan Bencana	0	150 RT daerah Rawan Bencana	15.270.000	150 RT daerah Rawan Bencana	30.280.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.021.xxx.	Penyebaran Informasi Kegiatan Sosial Melalui Aplikasi Media Sosial	Persentase Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial	-	6 LK3	0	6 LK3	10.000.000	6 LK3	0	6 LK3	7.850.000	6 LK3	0	6 LK3	17.850.000	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.022.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Persentase beroperasinya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS	93%	94%	179.549.000	95%	202.200.000	96%	508.650.000	97%	515.240.000	98%	521.950.000	98%	1.927.589.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.022.001.	Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang mampu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	5 orang TKSK	5 orang TKSK	53.101.000	5 orang TKSK	58.000.000	5 orang TKSK	65.000.000	5 orang TKSK	65.000.000	5 orang TKSK	71.500.000	5 orang TKSK	312.601.000	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.022.002.	Peningkatan Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Koordinator, operator dan pendamping PKH yang memberikan pelayanan	9 Orang	28 Orang	91.477.000	28 Orang	95.000.000	28 Orang	300.000.000	28 Orang	300.000.000	28 Orang	400.000.000	28 Orang	1.186.477.000	26 Kelurahan di Kota Singkawang
		Jumlah KPM PKH yang menerima bantuan	2000 KPM	7000 KPM		6000 KPM		5000 KPM		4500 KPM		4000 KPM		3000 KPM		
		Persentase sarana dan prasana operasional sekretariat PKH	40%	40%		50%		60%		70%		80%		80%		
1.06.1.06.0 1.022.003.	Kebijakan Peraturan Bidang Sosial	Jumlah dokumen kebijakan peraturan bidang sosial	1 Raperda	Raperda penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial	0	Raperda penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial	0	Raperda penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial	0	Raperda penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial	0	Raperda penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial	0	Raperda penangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial	0	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1.06.1.06.0 1.022.004.	Kebijakan Peraturan Urusan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan peraturan urusan rebilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Belum Ada Dokumen Kebijakan Peraturan	1 Perwako terkait Narkoba	34.971.000	1 Perwako terkait WRSE	35.000.000	1 Perwako terkait Disabilitas	43.650.000	1 Perwako terkait ABH	45.240.000	1 Perwako terkait LKSA	50.450.000	1 Perwako terkait Narkoba 1 Perwako terkait WRSE 1 Perwako terkait Disabilitas 1 Perwako terkait ABH 1 Perwako terkait LKSA	209.311.000	DSPPPA
1.06.1.06.0 1.022.xxx.	Bimbingan Teknis Jejaring Kerja TKSK	Jumlah jejaring kerja TKSK dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	-	100 orang PSKS	0	100 orang PSKS	0	100 orang PSKS	0	100 orang PSKS	0	100 orang PSKS	0	100 orang PSKS	0	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.022.xxx.	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Validasi dan Verifikasi Data PMKS sebanyak 24 Jenis PMKS	24 Jenis PMKS	24 Jenis PMKS	0	24 Jenis PMKS	14.200.000	24 Jenis PMKS	100.000.000	24 Jenis PMKS	105.000.000	24 Jenis PMKS	0	24 Jenis PMKS	219.200.000	26 Kelurahan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.022.xxx.	Fasilitasi Pendampingan Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Jumlah Petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu	-	5 Kecamatan	0	5 Kecamatan	0	5 Kecamatan	0	5 Kecamatan	0	5 Kecamatan	0	5 Kecamatan	0	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.022.xxx.	Updating Data PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang terdata	-	Dokumen PMKS dan PSKS	0	Dokumen PMKS dan PSKS	0	Dokumen PMKS dan PSKS	0	Dokumen PMKS dan PSKS	0	Dokumen PMKS dan PSKS	0	Dokumen PMKS dan PSKS	0	26 Kelurahan di Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.022.xxx.	Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)	Jumlah Petugas verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	-	3 petugas input data, 62 verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	0	3 petugas input data, 62 verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	0	3 petugas input data, 62 verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	0	3 petugas input data, 62 verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	0	3 petugas input data, 62 verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	0	3 petugas input data, 62 verifikasi dan validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu	0	Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.029.	Program Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing	40%	40%	0	40%	80.000.000	40%	90.000.000	40%	90.000.000	40%	90.000.000	40%	350.000.000	DISSOSP3A
		Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/Penghargaan	90%	90%		88%		88%		86%		85%		85%		
1.06.1.06.0 1.029.001.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan	1 TMP Bambu Runcing	1 TMP Bambu Runcing	0	1 TMP Bambu Runcing	20.000.000	1 TMP Bambu Runcing	20.000.000	1 TMP Bambu Runcing	20.000.000	1 TMP Bambu Runcing	20.000.000	1 TMP Bambu Runcing	80.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.029.xxx.	Santunan Bagi Veteran dan Perintis Kemerdekaan	Jumlah Veteran / Perintis kemerdekaan dan janda pejuang yang mendapat santunan	-	19 Veteran, 49 janda pejuang	0	19 Veteran, 49 janda pejuang	40.000.000	19 Veteran, 49 janda pejuang	50.000.000	19 Veteran, 49 janda pejuang	50.000.000	19 Veteran, 49 janda pejuang	50.000.000	19 Veteran, 49 janda pejuang	190.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.029.xxx.	Pembinaan Wawasan Kepahlawanan Bagi Generasi Muda	Jumlah generasi muda/pelajar mendapat pembinaan wawasan kepahlawanan	-	2000 pelajar (SMP/SMA)	0	2000 pelajar (SMP/SMA)	20.000.000	2000 pelajar (SMP/SMA)	20.000.000	2000 pelajar (SMP/SMA)	20.000.000	2000 pelajar (SMP/SMA)	20.000.000	2000 pelajar (SMP/SMA)	80.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.xxx.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo yang memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi	20%	21%	0	31%	80.000.000	41%	80.000.000	51%	80.000.000	61%	80.000.000	61%	320.000.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Skala Kota	Jumlah panti yang memperoleh bantuan peningkatan sarana dan prasarana dalam kesehatan dan sanitasi	12 Panti	12 Panti	0	2 Panti	60.000.000	2 Panti	60.000.000	2 Panti	60.000.000	2 Panti	60.000.000	12 Panti	240.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1.06.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Panti Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah panti yang memperoleh peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan sesuai standar pelayanan	12 Panti	12 Panti	0	4 Panti	20.000.000	4 Panti	20.000.000	4 Panti	20.000.000	4 Panti	20.000.000	12 Panti	80.000.000	5 Kecamatan di Kota Singkawang
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				88.288.800		601.080.000		914.800.000		1.213.040.000		1.479.380.000		4.296.588.800	
2.02.1.06.0 1.xxx.	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	42%	50%	0	57%	80.000.000	62%	90.000.000	68%	100.000.000	72%	105.000.000	72%	375.000.000	DISSOSP3A
		Persentase penanganan perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan secara komprehensif	68%	70%		75%		78%		80%		87%		87%		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Advokasi dan Fasilitas Shelter Bagi Perempuan	Jumlah pengaduan yang masuk ke P2TP2A terkait korban kekerasan (KTA,KTP,KDRT & TPPO)	25 kasus	35 kasus	0	50 kasus	10.000.000	60 kasus	10.000.000	70 kasus	20.000.000	75 kasus	20.000.000	290 kasus	60.000.000	Kota Singkawang
		Jumlah korban dan rawan menjadi korban kekerasan berbasis gender yang terjangkau oleh petugas penjangkau	50 kasus	55 kasus		60 kasus		65 kasus		70 kasus		75 kasus		325 kasus		
		Jumlah peserta rakor yang hadir pada kegiatan rakor Tim P2TP2A Kota Singkawang	30 orang	35 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		195 orang		
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (Hari Kartini dan Hari Ibu)	Jumlah peserta pada kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	350 orang dan 400 orang	350 orang dan 400 orang	0	350 orang dan 400 orang	10.000.000	350 orang dan 400 orang	10.000.000	350 orang dan 400 orang	10.000.000	350 orang dan 400 orang	10.000.000	350 orang dan 400 orang	40.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga	Peningkatan jumlah perempuan kepala keluarga di Kota Singkawang yang mengikuti pelatihan	100 Peserta	100 Peserta	0	100 Peserta	10.000.000	100 Peserta	10.000.000	125 Peserta	10.000.000	125 Peserta	10.000.000	550 Peserta	40.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Penyuluhan kepada Kepala Rumah Tangga Untuk Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta pada kegiatan penyuluhan	120 Orang	120 Orang	0	150 Orang	10.000.000	150 Orang	15.000.000	150 Orang	20.000.000	150 Orang	20.000.000	720 Orang	65.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender	Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan	100 Orang	100 Orang	0	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	500 Orang	40.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Repitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah kecamatan yang dinilai capaian kriteria sayang ibu	5 Kecamatan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan Kepada Petugas Bimbingan Rohani Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Peningkatan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani dari petugas terlatih pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	-	-	0	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	40.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan Kepada Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Peningkatan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dari petugas terlatih pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	-	-	0	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	40.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan Keterampilan bagi Korban KDRT dan Trafficking	Peningkatan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dari petugas terlatih pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	-	-	0	30 Orang	10.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	50.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarutamaan Gender)	Persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)	0%	5%	88.288.800	10%	40.000.000	20%	40.800.000	50%	41.620.000	75%	42.460.000	75%	253.168.800	DISSOSP3A
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Rakor Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Terlaksananya rapat koordinasi antar Instansi/Lembaga terkait	95%	1 Perwako	88.288.800	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.800.000	100 Orang	41.620.000	100 Orang	42.460.000	400 Orang	253.168.800	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan PUG Melalui PPRG	Jumlah lembaga yang menerapkan PPRG	-	23 Lembaga	0	24 Lembaga	0	25 Lembaga	0	26 Lembaga	0	27 Lembaga	0	27 Lembaga	0	
2.02.1.06.0 1.xxx.	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak	85%	87%	0	88%	481.080.000	92%	784.000.000	95%	1.071.420.000	96%	1.331.920.000	96%	3.668.420.000	DISSOSP3A
		Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komperhensif	70%	75%		77%		87%		87%		90%		90%		
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Kapasitas FAD	Jumlah jenis pengetahuan atau keterampilan baru yang dikuasai	150 orang	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Rakor Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Pembelajaran Untuk Pematapan KLA (Kota Layak Anak)	Lembaga/Instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah mendukung KLA melalui Program/Kegiatan terkait pengarusutamaan hak anak	1 Program / Kegiatan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Kapasitas Pendidik Sekolah Ramah Anak	Jumlah tenaga pendidik, pejabat terkait, orang tua, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan pengembangan sekolah ramah anak	-	-	0	80 orang	0	80 orang	0	80 orang	0	80 orang	0	320 orang	0	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Anak Integratif	Jumlah Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Anak Integratif yang dikembangkan	-	-	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Regenerasi Forum Anak)	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam forum anak daerah. Jumlah anak yang terpilih dalam pengurus inti.	100 orang	100 orang; 9 orang	0	100 orang; 9 orang	0	100 orang; 9 orang	0	100 orang; 9 orang	0	100 orang; 9 orang	0	100 orang; 9 orang	0	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (Hari Anak Nasional)	Jumlah peserta pada kegiatan Hari Anak Nasional	500 orang	450 Orang	0	500 Orang	150.000.000	500 Orang	250.000.000	500 Orang	350.000.000	500 Orang	450.000.000	2450 orang	1.200.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak	Jumlah kelompok peserta kreasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak	26 kelompok	26 kelompok	0	26 kelompok	90.540.000	26 kelompok	142.000.000	26 kelompok	185.710.000	26 kelompok	215.960.000	26 kelompok	634.210.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pembinaan Karakter dan Kreativitas Anak Dalam Mendorong Terwujudnya Kota Layak Anak	Jumlah anak berbakat, anak kelompok rentan dan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dimonitor	-	20 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 Bulan	0	50 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 Bulan	90.540.000	50 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 Bulan	142.000.000	50 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 Bulan	185.710.000	50 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 Bulan	215.960.000	50 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 Bulan	634.210.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Perlindungan Anak Terpadu	Jumlah Kader Perlindungan Anak yang meningkat Kapasitasnya	-	35 Orang	0	40 Orang	150.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	350.000.000	150 Orang	450.000.000	435 Orang	1.200.000.000	Kota Singkawang
2.02.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pengembangan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Jumlah PUSPAGA yang dikembangkan	-	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				0		40.000.000		85.000.000		90.000.000		90.000.000		305.000.000	
2.07.1.06.0 1.xxx.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	90%	90%	0	90%	40.000.000	90%	85.000.000	90%	90.000.000	90%	90.000.000	90%	305.000.000	DISSOSP3A
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari besar Nasional dan Daerah	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	0	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	20.000.000	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	45.000.000	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	50.000.000	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	50.000.000	1 Hari Lansia Nasional (Halun)	165.000.000	Kota Singkawang
			1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)	1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)		1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)		1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)		1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)		1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)		1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)		1 Hari Diasabilitas Internasional (HDI)
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari besar Nasional dan Daerah	1 Hari Pahlawan	1 Hari Pahlawan	0	1 Hari Pahlawan	20.000.000	1 Hari Pahlawan	40.000.000	1 Hari Pahlawan	40.000.000	1 Hari Pahlawan	40.000.000	1 Hari Pahlawan	140.000.000	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.	Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan	22%	22%	0	45%	0	50%	0	60%	0	75%	0	75%	0	DISSOSP3A
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pemberdayaan Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Forum Kelurahan Siaga Aktif	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	0	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	0	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	0	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	0	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	0	26 Forum Kelurahan Siaga Aktif	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera	Jumlah inovasi TTG pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera	3 Inovasi TTG	3 Inovasi TTG	0	3 Inovasi TTG	0	3 Inovasi TTG	0	3 Inovasi TTG	0	3 Inovasi TTG	0	3 Inovasi TTG	0	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pembinaan P2WKSS Kelurahan Unggulan	Jumlah kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	0	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	0	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	0	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	0	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	0	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Jumlah Kelurahan Unggulan	3 Kelurahan unggulan	3 Kelurahan unggulan	0	3 Kelurahan unggulan	0	3 Kelurahan unggulan	0	3 Kelurahan unggulan	0	3 Kelurahan unggulan	0	3 Kelurahan unggulan	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah organisasi pengurus PKK	31 TP. PKK	31 TP. PKK	0	31 TP. PKK	0	31 TP. PKK	0	31 TP. PKK	0	31 TP. PKK	0	31 TP. PKK	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah kasi pemberdayaan masyarakat mengerti tugas dan fungsi	31 kasi. Pemberdayaan	31 kasi. Pemberdayaan	0	31 kasi. Pemberdayaan	0	31 kasi. Pemberdayaan	0	31 kasi. Pemberdayaan	0	31 kasi. Pemberdayaan	0	31 kasi. Pemberdayaan	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan	Jumlah ketersediaan data profil 26 kelurahan	-	-	0	Ketersediaan data profil 26 kelurahan	0	Pemutakhiran data profil 26 kelurahan	0	Pemutakhiran data profil 26 kelurahan	0	Pemutakhiran data profil 26 kelurahan	0	Pemutakhiran data profil 26 kelurahan	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.0 1.xxx.xxx.	Pembinaan Peningkatan Pos Pelayanan Teknologi	Jumlah peningkatan 5 pos pelayanan teknologi	-	-	0	Peningkatan 5 pos pelayanan teknologi	0	Peningkatan 5 pos pelayanan teknologi	0	Peningkatan 5 pos pelayanan teknologi	0	Peningkatan 5 pos pelayanan teknologi	0	Peningkatan 5 pos pelayanan teknologi	0	Kota Singkawang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.07.1.06.01.xxx.xxx.	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna	-	-	0	26 kelompok karang taruna	0	26 kelompok karang taruna	0	26 kelompok karang taruna	0	26 kelompok karang taruna	0	26 kelompok karang taruna	0	Kota Singkawang
2.07.1.06.01.xxx.xxx.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	0	32 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	32 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	32 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	32 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	32 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	Kota Singkawang
2.08.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				398.317.400									398.317.400		
2.08.1.06.01.025.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender, peran serta perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	30%	40%	57.004.000									57.004.000	DISSOSP3A	
		Persentase Peningkatan Partisipasi anak dalam pembangunan	-	80%												
2.08.1.06.01.025.004	Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (Hari Kartini dan Hari Ibu)	Jumlah peserta pada kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	350 orang dan 400 orang	350 orang dan 400 orang	39.200.000									39.200.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.025.005	Pembinaan Karakter dan Kreativitas Anak Dalam Mendorong Terwujudnya Kota Layak Anak	Jumlah Anak Berbakat, Anak Kelompok Rentan dan atau Anak memerlukan perlindungan khusus yang dapat dimonitor	-	20 Orang, dilakukan secara berkala selama 3 bulan	17.804.000									17.804.000	Kota Singkawang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2.08.1.06.01.026.	Program Pengembangan Kebijakan Daerah Perlindungan Keluarga dan Anak	Meningkatkan proses pencegahan dan pelayanan yang prima pada berbagai macam aspek pelayanan terkait Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	40%	50%	225.174.400									225.174.400	DISSOSP3A	
2.08.1.06.01.026.002	Advokasi dan Fasilitasi Shelter bagi Perempuan	1. Jumlah pengaduan yang masuk ke P2TP2A terkait korban kekerasan (KTA,KTP,KDRT & TPPO)	1) 25 kasus	1) 35 kasus	52.218.800									52.218.800	Kota Singkawang	
		2. Jumlah korban dan rawan menjadi korban kekerasan berbasis gender yang terjangkau oleh petugas penjangkau	2) 50 kasus	2) 55 kasus												
		3. Jumlah peserta rakor yang hadir pada kegiatan rakor Tim P2TP2A Kota Singkawang	3) 30 orang	3) 35 orang												
2.08.1.06.01.026.003	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah anak yang berpartisipasi pada FAD Tk. Kota Singkawang	100 orang	80 orang	43.333.600									43.333.600	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.026.005	Pelatihan Peningkatan Keterampilan untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	100 Peserta	100 Peserta	32.232.000									32.232.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.026.006	Pegembangan Peran Serta Perempuan Ibu dan Anak	Jumlah peserta pada kegiatan Hari Anak Nasional	500 Orang	450 Orang	26.350.000									26.350.000	Kota Singkawang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2.08.1.06.01.026.008	Rakor Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Terlaksananya rapat koordinasi antar Instansi/Lembaga terkait	1 Perwako	1 Perwako	3.967.000									3.967.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.026.009	Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender	Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan	100 Orang	100 Orang	29.345.000									29.345.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.026.010	Penyuluhan Kepada Kepala Rumah Tangga untuk Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan	120 Orang	120 Orang	22.103.000									22.103.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.026.011	Perlindungan Anak Terpadu	Meningkatnya kemandirian perekonomian perempuan	-	35 Orang	15.625.000									15.625.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.027.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase peran kelompok wanita di kelurahan	22%	100%	116.139.000									116.139.000	DISSOSP3A	
2.08.1.06.01.027.004	Pembinaan P2WKSS Kelurahan Unggulan	Jumlah kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan	45.258.000									45.258.000	Kota Singkawang	
2.08.1.06.01.027.005	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Jumlah Kelurahan Unggulan	3 Kelurahan unggulan	3 Kelurahan unggulan	70.881.000									70.881.000	Kota Singkawang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
PENUNJANG URUSAN LAINNYA					843.760.000		863.590.000		880.400.000		898.740.000		920.350.000		4.406.840.000	
1.06.1.06.0 1.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	663.160.000	100%	676.420.000	100%	689.950.000	100%	703.760.000	100%	717.830.000	100%	3.451.120.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1.440.000	100%	1.584.000	100%	1.742.400	100%	1.916.640	100%	2.108.304	100%	8.791.344	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	84.000.000	100%	92.400.000	100%	101.640.000	100%	111.804.000	100%	122.984.400	100%	512.828.400	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	4.700.000	100%	5.170.000	100%	5.687.000	100%	6.255.700	100%	6.881.270	100%	28.693.970	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Penyediaan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	100%	100%	65.130.000	100%	71.643.000	100%	78.807.300	100%	86.688.030	100%	95.356.833	100%	397.625.163	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	6.325.400	100%	6.957.940	100%	7.653.734	100%	8.419.107	100%	9.261.018	100%	38.617.199	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	43.800.100	100%	48.180.110	100%	52.998.121	100%	58.297.933	100%	64.127.726	100%	267.403.991	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	17.733.000	100%	19.506.300	100%	21.456.930	100%	23.602.623	100%	25.962.885	100%	108.261.738	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	6.726.000	100%	7.398.600	100%	8.138.460	100%	8.952.306	100%	9.847.537	100%	41.062.903	DISSOSP3A

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.001.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	0	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	69.615.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	3.240.000	100%	3.564.000	100%	3.920.400	100%	4.312.440	100%	4.743.684	100%	19.780.524	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	17.830.000	100%	19.613.000	100%	21.574.300	100%	23.731.730	100%	26.104.903	100%	108.853.933	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	329.759.500	100%	294.679.450	100%	270.035.395	100%	241.853.935	100%	209.733.328	100%	1.346.061.608	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.020.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	100%	76.476.000	100%	84.123.600	100%	92.535.960	100%	101.789.556	100%	111.968.512	100%	466.893.628	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.001.022.	Penataan dan Inventarisasi Aset	Cakupan Penataan dan Inventarisasi Aset	100%	100%	6.000.000	100%	6.600.000	100%	7.260.000	100%	7.986.000	100%	8.784.600	100%	36.630.600	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	128.200.000	100%	130.770.000	100%	133.390.000	100%	136.060.000	100%	138.780.000	100%	667.200.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.002.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	0	4 unit sepeda motor	53.774.000	4 unit sepeda motor	56.394.000	4 unit sepeda motor	59.064.000	4 unit sepeda motor	61.784.000	16 unit sepeda motor	231.016.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.002.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Cakupan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	-	0	1 unit tabung pemadam kebakaran	0	1 unit tabung pemadam kebakaran	0	1 unit tabung pemadam kebakaran	0	1 unit tabung pemadam kebakaran	0	4 unit tabung pemadam kebakaran	0	DISSOSP3A

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1.06.1.06.0 1.002.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 unit Finger Print, 2 unit PC	2 unit PC, 1 unit Notebook, 3 unit printer	40.188.000	4 unit PC, 1 unit Notebook, 6 unit printer, 1 unit mesin fotokopi	0	2 unit PC, 1 unit Notebook, 2 unit printer, 1 unit mesin fotokopi	0	2 unit PC, 1 unit Notebook, 2 unit printer	0	2 unit PC, 1 unit Notebook, 2 unit printer	0	12 unit PC, 5 unit Notebook, 15 unit printer, 2 unit mesin fotokopi	40.188.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	15.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	55.000.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.002.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	56.996.000	100%	56.996.000	100%	56.996.000	100%	56.996.000	100%	56.996.000	100%	284.980.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.002.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	16.016.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	56.016.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.003.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	100%	15.000.000	100%	15.300.000	100%	15.610.000	100%	15.920.000	100%	16.240.000	100%	78.070.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.003.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	40 Setel	0	40 Setel	0	40 Setel	0	40 Setel	0	40 Setel	0	200 Setel	0	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.003.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Cakupan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	40 Setel	15.000.000	40 Setel	15.300.000	40 Setel	15.610.000	40 Setel	15.920.000	40 Setel	16.240.000	200 Setel	78.070.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.006.	Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	16.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	74.000.000	DISSOSP3A

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1.06.1.06.0 1.006.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (PERJANJIAN KINERJA, RENJA, LAKIP, SPM, LPPD)	4 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	25 Dokumen	24.000.000	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	24.000.000	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.005.	Penyusunan LAKIP PD	Dokumen LAKIP PD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.006.	Penyusunan Renstra PD	Dokumen Renstra PD	-	1 Dokumen	4.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	4.000.000	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.007.	Penyusunan LPPD / LKPJ	Dokumen LPPD / LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.008.	Penyusunan Profil PD	Dokumen Profil PD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.010.	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.011.	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah	Cakupan Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah	-	11 Dokumen	4.000.000	11 Dokumen	4.000.000	11 Dokumen	4.000.000	11 Dokumen	5.000.000	11 Dokumen	5.000.000	55 Dokumen	22.000.000	DISSOSP3A	
1.06.1.06.0 1.006.012.	Penyusunan Renja PD	Dokumen Renja PD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DISSOSP3A	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2022)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.06.1.06.0 1.007.	Program Penguatan Transparansi Publik	Persentase Transparansi Publik	100%	100%	17.000.000	100%	20.100.000	100%	20.200.000	100%	20.500.000	100%	25.000.000	100%	102.800.000	DISSOSP3A
1.06.1.06.0 1.007.001.	Expo Kinerja PD	Jumlah kegiatan expo kinerja PD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.000.000	1 Kegiatan	20.100.000	1 Kegiatan	20.200.000	1 Kegiatan	20.500.000	1 Kegiatan	25.000.000	5 Kegiatan	102.800.000	DISSOSP3A
4.05.1.06.0 1.051.	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS	-	100%	4.400.000	100%	7.000.000	100%	7.250.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	33.650.000	DISSOSP3A
4.05.1.06.0 1.051.012.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Dokumen evaluasi jabatan	-	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.250.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	5 Dokumen	33.650.000	DISSOSP3A
J U M L A H					2.034.821.200		2.753.560.000		3.929.560.000		4.558.700.000		4.890.290.000		18.166.931.200	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang pada akhir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan walikota dalam memimpin Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN / TAHUN					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00

Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang seutuhnya tentang indikator kinerja daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, maka diuraikan juga indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

a. Sosial

Khusus untuk bidang urusan sosial telah terbit Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, dimana di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan bidang urusan sosial termasuk salah satu diantaranya.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial bersesuaian dengan indikator kinerja daerah yang dituangkan di dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada pelayanan bidang urusan sosial di Kota Singkawang tahun 2018-2022 untuk masing-masing indikator sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal berjumlah 5 (lima) indikator ditambah 2 (dua) indikator untuk mengukur kinerja pada urusan sosial dikonsentrasi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Sosial Tahun 2018-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
1	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	30,00	55,00	60,00	65,00	75,00	75,00	75,00	
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	45,00	55,00	60,00	65,00	75,00	75,00	75,00	
4	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	75,00	75,00	
5	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	85,00	85,00	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
	saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)								
6	Persentase penanganan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (%)	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada pelayanan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Singkawang tahun 2018-2022 indikator kinerja daerahnya telah ditetapkan seperti tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan masing-masing indikator seperti dalam tabel berikut:

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,90	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	20,00	20,00	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	n/a	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	
4	Rasio KDRT (%)	0,87	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,10	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	50,00	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	74,00	91,00	94,00	95,00	98,00	100,00	100,00	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	73,00	89,00	93,00	95,00	97,00	100,00	100,00	
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	47,00	51,00	54,00	61,00	65,00	70,00	70,00	
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	78,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	63,00	82,00	88,00	92,00	98,00	100,00	100,00	
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	71,75	75,00	78,00	93,00	97,00	100,00	100,00	

c. Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok-kelompok yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan semua kelompok PKK terus didorong sehingga semuanya aktif dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota.

Pada pelayanan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Singkawang tahun 2018-2022 indikator kinerja daerahnya telah ditetapkan seperti tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan masing-masing indikator seperti dalam tabel berikut :

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	
3	Persentase LSM aktif (%)	55,04	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
4	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan pedoman bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5 (lima) tahun ke depan agar terpadu dan searah dengan RPJMD Kota Singkawang, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 akan menjadi pendorong dalam membangun gerakan komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih yaitu Singkawang HEBAT 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang utuh dari seluruh aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, komitmen, dukungan dan kerjasama dengan pihak ketiga serta masyarakat Kota Singkawang.

Terkait hal tersebut maka dalam penyusunan dan penyiapan seluruh dokumen perencanaan dinas harus mengacu kepada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Singkawang, Juli 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Singkawang



Drs. ARMAN SUYONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581108 198303 1 014